

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Idzhar Nurcahyo

NPP. 29.0945

Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : idzharnurcahyo@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Genteng District is one of the sub-districts in Banyuwangi Regency which has an area of 82.34 Km². Genteng District is the fourth most populous sub-district in Banyuwangi Regency with a total of 95,264 people. Genteng District is also one of the sub-districts that implement the BPNT program. In its implementation, there are still problems in the tile sub-district BPNT program. For example, there is social jealousy between people who get help and those who don't, so the community makes online complaints that the person concerned has not received social assistance to the Tile District. The results of a temporary interview with one resident of Genteng Kulon Village stated that he was worthy of receiving social assistance. Based on these problems, the researchers are interested in conducting further research. **Purpose** This study aims to determine how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Policy (BPNT) in Overcoming Poverty in Genteng District, Banyuwangi Regency and to find out the supporting and inhibiting factors and how to overcome the inhibiting factors of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in Overcoming Poverty in Genteng District, Banyuwangi Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Informants were determined by purposive sampling technique. Data collection was done by interview, observation and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data classification, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions. To test the success of the program, this study uses Merilee S. Grindle's implementation theory with 2 major variables, namely policy and policy context. **Results:** Based on the results of research conducted by researchers in implementing the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in tackling poverty in Genteng District, Banyuwangi Regency, it shows that the implementation of the policy has not been optimal. **Conclusion:** The implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy has not been optimal due to resource indicators and program implementers. The supporting factors are clear regulations and the participation of program implementers as well as inhibiting factors, namely the poor who have not received assistance, EDC machines are often disturbed, and KKS is blocked.

Keywords: Implementation, BPNT, Beneficiary Families (KPM)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kecamatan Genteng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai luas wilayah 82,34 Km². Kecamatan Genteng merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak ke 4 di Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah 95.264 jiwa. Kecamatan Genteng juga termasuk kecamatan yang melaksanakan program BPNT. Dalam Pelaksanaannya, di Kecamatan Genteng program BPNT masih terdapat masalah. Seperti adanya kecemburuan sosial antar masyarakat yang mendapat bantuan dengan yang tidak mendapat bantuan sehingga masyarakat tersebut melakukan pengaduan secara online bahwa yang bersangkutan belum mendapat bantuan sosial kepada pihak Kecamatan Genteng. Adapun hasil wawancara sementara bersama salah satu warga Desa Genteng Kulon menyatakan bahwa beliau seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Berdasarkan adanya masalah tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keberhasilan program, penelitian ini menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle dengan 2 (dua) variabel besar yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi menunjukkan pelaksanaan kebijakannya belum optimal. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum optimal dikarenakan pada indikator sumber daya dan pelaksana program. Adapun faktor pendukung yaitu peraturan yang jelas dan partisipasi pelaksana program juga faktor penghambat yaitu masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan, mesin edc sering gangguan, dan KKS terblokir.

Kata Kunci: Implementasi, BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia mencapai 274,9 juta jiwa tersebar di seluruh penjuru negeri sehingga Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia (Databoks, 2020). Padatnya penduduk Indonesia menimbulkan banyaknya masalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah dituntut bekerja lebih keras untuk mewujudkan tujuan negara yang tertuang pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Dari pasal tersebut menyebutkan masalah kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat saat ini salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Adapun program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan bantuan pangan yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai atau bukan uang akan tetapi melalui

mekanisme elektronik. BPNT tidak bisa dicairkan menjadi uang, melainkan hanya bisa dibelikan bahan pangan di e-warong. Penerima BPNT merupakan keluarga yang berkriteria kondisi sosial ekonomi terendah di daerah yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT yang ditetapkan oleh Kemensos. Adapun tujuan BPNT adalah ketepatan sasaran penerima program, memberikan kandungan gizi yang baik dengan memberikan banyak pilihan produk pangan, mengupayakan kenaikan usaha rakyat eceran, memberikan pelayanan berupa akses keuangan, dan mengefektifkan anggaran. Manfaat BPNT adalah meningkatkan ketahanan pangan bagi penerima program sekaligus bentuk upaya perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan, mengefisienkan bentuk penyaluran bantuan, memberikan pemahaman kepada penerima program mengenai pelayanan perbankan, meningkatkan transaksi non tunai, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM pada bidang perdagangan. Dalam jangka panjang program BPNT diharapkan bisa memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemampuan ekonomi masyarakat penerima program.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program BPNT sudah diluncurkan di Kabupaten Banyuwangi pada Senin, 25 Mei 2018 oleh Wakil Bupati Yusuf Widyamoko secara simbolik kepada KPM lewat pemberian Kartu Keluarga Sehat (KKS). Dengan peluncuran program BPNT diharapkan dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi sudah tersebar penerima BPNT di setiap kecamatan. Jika diakumulasikan penerima BPNT sejumlah 105.139 orang.

Kecamatan Genteng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai luas wilayah 82,34 Km². Kecamatan Genteng merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak ke 4 di Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah 95.264 jiwa. Kecamatan Genteng juga termasuk kecamatan yang melaksanakan program BPNT. Dalam Pelaksanaannya, di Kecamatan Genteng program BPNT masih terdapat masalah. Seperti adanya kecemburuan sosial antar masyarakat yang mendapat bantuan dengan yang tidak mendapat bantuan sehingga masyarakat tersebut melakukan pengaduan secara online bahwa yang bersangkutan belum mendapat bantuan sosial kepada pihak Kecamatan Genteng. Adapun hasil wawancara sementara bersama salah satu warga Desa Genteng Kulon menyatakan bahwa beliau seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan sosial.

1.3 Penelitian Terdahulu

Rifani Djaenal, J. E. Kaawoan, dan Ismail Rachman dalam jurnal berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore menyatakan bahwa Kebijakan BPNT pada indikator komunikasi belum terlaksana dengan baik karena masi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Fasilitas atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan program BPNT masi sering mengalami gangguan/eror serta jarak antar rumah KPM dan ewarung sangat jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan dan dari program BPNT tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan pangan KPM, Dukungan ataupun sikap dan pelayanan dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Semua pihak ikut serta dalam membantu berjalannya proses sosialisasi hingga penyaluran BPNT kepada KPM, dan semua pihak pemerintah setempat maupun pemerintah daerah yang terlibat di dalam proses pelaksanaan penyaluran Program BPNT sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan yang telah di buat oleh pemerintah pusat. Selanjutnya penelitian oleh Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati, dan Roni Pindahanto dalam jurnal berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu

menunjukkan bahwa gambaran Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai terdapat empat proses yaitu Registrasi atau Pembukaan Rekening, Edukasi dan Sosialisasi, Penyaluran, Pembelian Barang. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dirasa sudah baik dengan menggunakan E-warung sebagai tempat pembelian bahan pangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki faktor pendukung yaitu dengan pemerintah atau pelaksanaan kegiatan cukup tanggap akan kendala-kendala yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat itu. Selanjutnya penelitian oleh Imal Alimah Akmal dalam skripsi yang berjudul Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa mengatakan mplementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan BPNT yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu yang sudah sepenuhnya tercapai walaupun belum maksimal. Selanjutnya penelitian oleh Kuni Nabila, Pudjo Suharso, dan Wiwin Hartanto dalam jurnal berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman BPNT 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, dengan beberapa tahap, sosialisasi, registrasi, penyaluran dan pembayaran. Terdapat masalah pada tahapan implementasi program, pada tahap sosialisasi belum terlaksana dengan baik mengakibatkan adanya miss communication antara pemerintah dan masyarakat, waktu penerimaan sembako yang tidak tepat waktu, kartu kombo yang tidak dapat dicairkan sedangkan di data pemerintah masih menjadi penerima aktif, jumlah sembako yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah yaitu Rp110.000,00, pengambilan bantuan yang diwakilkan oleh sanak saudara atau tetangga. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut terdiri dari, komunikasi kepada masyarakat, sumberdaya yang tersedia dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program. Selanjutnya penelitian oleh Azizah, Akhmad Nikhrawi Hamdie, Dan H. Muhammad Uhaib As'ad Dalam Jurnal Berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin menunjukkan Implementasi Program Bantuan Pangan NonTunai Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang tidak krusial tapi cukup berpengaruh dan ini masih perlu diperbaiki kedepannya agar program terus berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebenaran Ilmiah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di daerah penelitian masing-masing. Dari sampel penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa kebanyakan menggunakan teori implementasi George Edward III untuk melihat implementasinya. Sementara pada penelitian ini menggunakan teori implementasi yang jarang digunakan khususnya pada penelitian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu dengan teori implementasi Merilee S. Grindle.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih didasarkan karena dalam penelitian kualitatif peneliti akan melihat semua komponen, hubungan satu dengan lainnya dan juga kinerjanya. Hal ini sangat cocok digunakan di penelitian ini karena peneliti ingin melihat bagaimana hubungan antara komponen-komponen yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan program BPNT. Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Siyoto dan Sodik (2015:11) penelitian deskriptif kaitannya dengan pengkajian secara detail mengenai fenomena atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan di lapangan sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur semi terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap jawaban tersebut. Adapun media yang diperlukan dalam wawancara penelitian ini adalah alat tulis dan perekam suara (jika diperlukan). Wawancara dilakukan dengan cara langsung (face to face) atau jika kondisi tidak memungkinkan wawancara dilakukan dengan cara daring. Penelitian ini juga menggunakan observasi dengan tujuan untuk mengetahui langsung jalannya program dan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan juga dokumentasi yang dijadikan sebagai pengumpul data dalam penunjang penelitian yang berbentuk catatan dan gambar secara visual sehingga dapat dilihat kondisi riil di lapangan. Adapun media pengumpul data dokumentasi yang digunakan penelitian ini adalah kamera untuk foto dan video (jika diperlukan).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Salah satu cara yaitu dengan menganalisis data. Adapun menurut Siyoto and Sodik (2015:98) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Adapun proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi peneliti menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle.

3.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marile S. Gridle. Proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi akan berjalan apabila telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang terwujud dalam program yang telah disusun serta adanya dana yang disiapkan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran (Grindle 1980:7). Dalam hal ini, menurut Grindle implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan.

1. Isi Kebijakan

A. Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan

Kepentingan yang terpengaruhi merupakan salah satu bagian dari dibuatnya kebijakan dimana kebijakan yang dibuat tersebut berpengaruh terhadap lingkungan kebijakan dalam hal ini subjek maupun objek dari adanya kebijakan tersebut. menyimpulkan hasil dari indikator ini kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan memang masyarakat kurang mampu yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah ditetapkan. Masyarakat

khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung bisa merasakan bantuan yang disalurkan pemerintah.

B. Jenis manfaat yang dihasilkan

Suatu kebijakan akan dinyatakan berhasil apabila implementasi dari kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat memberikan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran atau subjek dari suatu kebijakan tersebut. menyimpulkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak hanya memberikan manfaat secara simbolis akan tetapi, memberikan beberapa manfaat yang aktual sesuai dengan tujuan yaitu mengurangi beban pengeluaran dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Adapun rincian dari manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai berikut:

1. Kebutuhan bahan pokok pangan bergizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terpenuhi. Adapun manfaat yang diterima berupa uang non cash sesuai dengan judul program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp. 200.000 yang ditukarkan dengan bahan pangan yang sudah dibentuk paket sembako oleh agen e-warong yang sudah ditunjuk sebelumnya.
2. Pertumbuhan ekonomi meningkat, khususnya bagi usaha dagang. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud bagi agen e-warong. Manfaat yang diterima agen e-warong tersebut yaitu hasil dari penjualan bahan pangan menjadi meningkat.

C. Derajat perubahan yang diinginkan

Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam hal menanggulangi kemiskinan. Dalam penelitian ini pada indikator derajat perubahan yang telah dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat Kecamatan Genteng, khususnya bagi masyarakat miskin yang mendapat bantuan.
2. Kebutuhan pokok pangan terpenuhi masyarakat miskin yang mendapat bantuan.
3. Mengurangi biaya yang dikeluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

D. Letak pengambilan keputusan

Stakeholders mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Keputusan tersebut harus mementingkan kepentingan bersama, sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Keputusan yang diambil sangat menentukan apakah kebijakan yang dijalankan berhasil atau sebaliknya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini keputusan yang telah dibuat sudah tepat. Hal tersebut ditandai munculnya kebijakan BPNT ini untuk memberikan bantuan pada masyarakat miskin dengan pihak-pihak melakukan koordinasi seperti dari desa atau kelurahan, kecamatan, dan Dinas Sosial Kabupaten yang berkoordinasi dengan provinsi dan selanjutnya pusat.

E. Pelaksana program

Untuk menjalankan suatu kebijakan salah satu indikator keberhasilannya adalah kualitas pelaksana program. Kebijakan tidak akan berjalan apabila tidak ada pelaksana program. Pelaksana program merupakan penggerak atau alat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksana program harus mempunyai kecakapan dan kompetensi pada profesi dalam programnya sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan maksimal. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tenaga pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah lengkap disesuaikan dengan wilayah kerjanya dan pelaksana programnya juga ditetapkan melalui tes seleksi yaitu terdiri dari agen e-warong, pihak desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), koordinator BPNT tingkat kabupaten, Dinas Sosial, tim koordinasi bansos provinsi dan pusat. Adapun pelaksanaan program BPNT dilaksanakan 10 hari pertama di awal bulan Kesimpulan pada indikator pelaksana program sudah bagus. Hal tersebut ditandai dengan kesesuaian pelaksana program dilapangan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

F. Sumber daya yang digunakan

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan diharuskan mempunyai sumber daya yang berkualitas. Hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa suatu kebijakan tersebut berhasil dan memberikan pengaruh positif. Sumber daya yang berkualitas tersebut akan menghasilkan pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan baik, berjalan secara maksimal, efektif dan efisien. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya pada pelaksanaan suatu kebijakan sangat berperan penting untuk mencapai keberhasilan yang ditujukan. Dalam hal ini pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Genteng sudah bisa dikatakan baik, meskipun terdapat hambatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia sebagai implementornya dipilih melalui seleksi berupa tes sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan yang baik dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sumber daya manusia yang dimaksud seperti yang disebutkan pada indikator pelaksana program yaitu Koordinator Kabupaten Banyuwangi, Koordinator Kecamatan Genteng, dan agen e-warong di setiap desa Kecamatan Genteng.
2. Anggaran berasal dari APBN yang dikuasakan untuk penggunaan anggaran kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. Pencairan anggaran yang diterima KPM sejumlah 200.000 rupiah.
3. Sarana dan prasarana lebih pada anggaran guna sosialisasi dan edukasi terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) seperti kebijakan, prinsip, mekanisme pelaksanaan program BPNT, produk yang disalurkan, tata cara penggunaan KKS, alur pengaduan, dan pentingnya menjaga kesehatan dengan pemenuhan gizi.
4. Pada sumber daya lainnya seperti mesin edc di setiap e-warongnya hanya terdapat satu sehingga bisa terjadi hambatan ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan transaksi.

2. Konteks Kebijakan

A. Karakteristik lembaga dan penguasa Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasaan, suatu kepentingan, dan bagaimana strategi pelaksanaannya dalam menjalankan suatu kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan dari implementornya diharapkan bisa mewujudkan harapan suatu kebijakan tersebut. Strategi implementornya akan membantu mencapai keberhasilan suatu kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan dari adanya kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sudah jelas untuk memberikan bantuan yang berdampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini utamanya bagi masyarakat miskin yang benar-benar kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sehingga dalam kebijakan ini tidak terdapat kepentingan lain yang dipengaruhi oleh kebijakan ini. Pelaksana Program BPNT di daerah tidak memiliki kekuasaan untuk menambah atau mengubah kebijakan program BPNT tersebut. Kekuasaan tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh pusat. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu dengan memasukkan data masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai daftar tunggu. Ketika terdapat perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikarenakan meninggal, pindah atau sudah dikategorikan mampu, maka data yang sudah dikumpulkan di BDT akan menggantikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tidak menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

B. Karakteristik lembaga penguasa

Suatu kebijakan tidak akan pernah lepas dari karakteristik lembaga dan penguasanya. Karakteristik pihak terkait atau stakeholders sangat mempengaruhi suatu kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa tentunya sudah diatur oleh pusat. Dalam hal ini kebijakan tersebut memerlukan adanya kerja sama dan koordinasi bagi pelaksana program di dalamnya. Sehingga penyelenggara melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dan terus melakukan koordinasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Kerja sama dan koordinasi yang dimaksud yaitu dari tingkat bawah yaitu desa memberikan laporan berupa data warga miskin yang diusulkan sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari tingkat kecamatan yaitu TKSK mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan memberikan laporan secara rutin kepada pendamping kabupaten, dan pendamping kabupaten mempunyai tanggung jawab atas pelaporan kepada dinas sosial.

C. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan

Tingkat kepatuhan yang dimaksud adalah ketika pelaksana kebijakan tersebut sudah melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai kewenangan dan SOP yang terdapat pada pedoman umum Bantuan Pangan Non tunai. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pelaksana kebijakan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memenuhi indikator kepatuhan dan daya tanggap yaitu hal tersebut ditunjukkan dari respon positif dari pelaksana program maupun penerima program tentang dan memberikan dukungan terhadap program ini. Adapun pada masing-masing pelaksana program telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditandai dengan ketika cairnya dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pelaksana program segera menyalurkan bantuan tersebut melalui mekanisme yang ada. Adapun ketika ditemukan masalah pada penyaluran maka pelaksana program segera menindaklanjuti dan dicarikan penyelesaian masalahnya.

3.2 Faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan terdapat faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung tersebut sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan. Sesuai dengan tujuan dari program BPNT adalah untuk mengurangi beban belanja KPM, memberikan KPM gizi yang lebih seimbang, Meningkatkan ketepatan sasaran KPM dan waktu penerimaan bantuan pangan, memberi KPM lebih banyak pilihan dan kendali untuk memenuhi kebutuhan mereka pangan serta berkontribusi pada pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada hal ini peneliti memaparkan apa yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Genteng yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan yang jelas akan memberikan gambaran yang jelas bagi pelaksana program
2. Partisipasi pelaksana program

Pada dasarnya suatu kebijakan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi hasil kebijakan tersebut. Faktor penghambat dalam pengimplementasian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Genteng berdasarkan hasil wawancara beberapa informan yaitu sebagai berikut:

1. Lambatnya penjangkauan masyarakat miskin
2. Mesin edc sering mengalami gangguan
3. Pin Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terblokir

Adanya faktor penghambat tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan dianggap tidak bisa memenuhi target apabila faktor penghambat tidak segera diselesaikan. Dalam hal ini pada program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) di Kecamatan Genteng. Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, dalam implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Genteng terdapat beberapa faktor penghambat Adapun upaya dalam mengatasi faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada pihak desa/kelurahan untuk terus melakukan pendataan lebih rutin berkala
2. Pengecekan dan perbaikan secara rutin mesin edc
3. Melaporkan kepada pihak bank untuk perbaikan dan melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hadirnya kebijakan serta proses implementasinya dari kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai memberikan banyak dampak positif baik yang didapatkan pelaksana program maupun penerima program, seperti halnya bagi pelaksana program yaitu keuntungan lebih dalam penjualan produknya khususnya agen e-warong dan juga bagi penerima program yaitu kebutuhan dasar makanan pokok bisa terpenuhi. Dengan adanya kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menanggulangi masalah yang ada di masyarakat yaitu kemiskinan melalui pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun dalam pelaksanaannya, masyarakat berharap kebijakan ini dapat berlangsung terus menerus.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi jika diuji dengan teori implementasi Merilee S. Grindle belum optimal dikarenakan pada indikator sumber daya dan pelaksana program. Faktor pendukung yang ditemui adalah peraturan yang jelas akan memberikan gambaran yang jelas bagi stakeholders dan Partisipasi pelaksana program komitmen pelaksana program dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Faktor penghambat yang ditemui adalah lambatnya penjangkauan masyarakat miskin, mesin edc sering mengalami gangguan dikarenakan terlalu sering melakukan transaksi, dan pin dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terblokir. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat yaitu sosialisasi kepada pihak desa/kelurahan untuk terus melakukan pendataan rutin berkala, Pengecekan dan perbaikan secara rutin mesin edc, dan Melaporkan kepada pihak bank untuk perbaikan dan melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton University press.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literai Media Publishing.
- Akmal, I. A. (2020). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Skripsi Oleh Imal Alimah Akmal Program Studi Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Washiyah Volume 1 No 2*.

Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 1–7.

Azizah, Hamdie, A. N., & As'ad, H. M. U. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Djaenal, R., Kaawoan, J. ., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore.

Nabila, K., Suharso, P., & Wiwin, H. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Databoks. (2020). Indonesia Peringkat ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia | Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia>

